

**RENCANA KERJA 2025**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Disperka Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Lalu, Tujuan dan capaian Renstra OPD, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerjanya.

Mojokerto, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO



NOERHONO, S Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721008 199201 1 001

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>29</b>
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	30
3.3 Program dan Kegiatan.....	31
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	11
Tabel 2.2.....	19
Tabel 2.3.....	20
Tabel 2.4.....	28
Tabel 3.1.....	31
Tabel 3.2 .....	35
Tabel 4.1.....	40

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 merupakan dokumen resmi daerah yang diperuntukkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Selain itu, Renja PD ini mempunyai fungsi penting yang mendasar dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat pengguna.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mojokerto dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerton Tahun 2019 Nomor 4) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Darah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

34. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/048/416-117/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
35. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/048/416-117/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Tim Penyusun Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pelayanan bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Bidang Pengembangan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang Perpustakaan dan kearsipan, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **1.1 Latar belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja PD, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi.

# **Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Subbab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindakluti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja PD, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
  - Jumlah program, jumlah kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan
  - Sifat penyebaran lokasi program, Kegiatan dan Sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu.

## **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, sub Kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2026.

## **Bab V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto per tanggal 29 Desember 2023 sebesar 91,59 % sebagai berikut:

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 4.592.633.400
Rasionalisasi APBD	<u>Rp. 90.868.039</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 4.501.765.361
Realisasi	<u>Rp. 4.123.044.438</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 378.720.923</u>

Sedangkan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebesar **Rp. 4.336.248.400,- (Empat Milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
(Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024**

**NAMA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg sd Tahun (N-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun (N-2)	Realisasi Renja PD Th (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Prog dan Keg sd Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,02	80,91	82,72 (A)	81,71 (A)	98,77%	82,72 (A)	82,75 (A)	100,04%
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	90,5%	91,59%	101,2%	91,60%	91,60%	100%
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100%
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	75,59	75,09	90	89,58	99,53%	90	90	100%
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	30 stel	-	30 Orang	310Orang	100%	-	-	-
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	-	-	-
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 paket	100%

2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%			
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	1 paket	100%			
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	1 paket	100%			
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	50 Laporan		100%	50 Laporan		
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	86%					
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.23.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi baik	12 bulan	12 bulan	90%					
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	12 bulan	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

		yang dipelihara/ Direhabilitasi								
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	1 unit	100%
<b>2.23.02</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>	11	12,138	13,5	72,12	534,22%	72,15	72,15	100%
		<b>2. Indeks Kegemaran Membaca</b>	40,5	63,94	67	66,6	99,40%	67	67	100%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<b>1. Jumlah Buku yang dibeli 2. Jumlah Peserta,</b>	1.1000 Eks 2. 100 Orang 3.20 Eks		1.250 Eks 2. 100 Orang 3.20 Eks	1. 398 Eks 2. 350 Orang 3. 20Eks				
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Eksemplar	18 Eksemplar	20 Eksemplar	20 Eksemplar	100%	25 Eksemplar	25 Eksemplar	100%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan	100 Orang	111 Orang	100 Orang	350 Orang	111%	100 Perpustakaan		
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang dicetak dan diadakan	1000 Eksemplar	623 eksemplar	250 Eksemplar	213 Eksemplar	62,3%	500 Eksemplar		
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	15 kali	12 kali	3 Kali	3 kali	100%			
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca			75 Lokus		100%	75 Lokus		

	Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar								
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	240 Orang	240 Orang	1 Perpustakaan	-		1 perpustakaan	1 perpustakaan	
<b>2.24.02</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja</b>	50%	133,%	50%	133,7%	267,4%			
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	<b>Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan</b>	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	100%			
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5 OPD	6 OPD	5 OPD	6 OPD	120%	250 Berkas		
2.24.02.2.01.02	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Keenangan Kabupaten/Kota	5 OPD	6 OPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah menyerahkan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	9 OPD	5 OPD	1 OPD	20%			
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip Statis	250 berkas	177 berkas	250 berkas	250 berkas	100%	250 arsip		
<b>2.24.03</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan Pertanggungjawaban</b>	53%	60%	53%	60%				
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 Peraturan	5 Peraturan	3 peraturan	3 peraturan	100%	3 Peraturan	3 Peraturan	

2.24.03.2.01.03	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			250 Arsip	250 Arsip	100%	250 Arsip	250 Arsip	100%
-----------------	---	---	--	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

Pada Tahun 2023 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun anggaran 2023, didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 4.501.765.361,-** dan yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel. Jumlah anggaran dan Realisasi Tahun 2023, terbagi ke dalam rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	SILPA
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.427.731.011</b>	<b>4.061.857.668</b>	<b>91,73</b>	<b>365.873.373</b>
	a. Belanja pegawai	4.059.911.000	3.666.786.261	90,31	393.124.739
	b. Belanja Barang dan Jasa	458.591.880	395.071.407	86,14	63.520.473
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>74.130.520</b>	<b>61.186.770</b>	<b>82,29</b>	<b>12.943.750</b>
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.453.830	39.217.450	82,53	10.236.380
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.676.690	21.969.320	89,02	2.707.370
	<b>Total</b>	<b>4.501.765.361</b>	<b>4.123.044.438</b>	<b>91,59</b>	<b>378.720.923</b>

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi pada Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	SILPA
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.372.164.261</b>	<b>4.001.713.368</b>	<b>91,52</b>	<b>370.450.893</b>
<b>1.</b>	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.310.000	2.989.000	69,35	1.321.000
<b>a.</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.365.000	1.585.000	67,02	780.000
<b>b.</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.945.000	1.404.000	72,19	541.000
<b>2.</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.990.239.000	3.649.106.261	91,45	341.132.739
<b>a.</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.990.239.000	3.649.106.261	91,45	341.132.739
<b>3.</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.247.170	90.107.550	83,24	18.139.620
<b>a.</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.903.830	39.217.450	78,58	10.686.380
<b>b.</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.973.340	19.310.900	96,68	662.440
<b>c.</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.450.000	5.273.400	96,76	176.600

d.	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	19.405.800	97,03	594.200
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.920.000	6.900.000	53,40	6.020.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.187.400	184.542.477	97,54	4.644.923
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.925.000	137.199.597	98,05	2.725.403
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.262.400	47.342.880	96,10	1.919.520
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.180.691	74.968.080	93,49	5.212.611
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.394.671	37.481.250	98,58	4.913.421
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.981.620	19.697.330	84,54	284.290
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.804.400	17.789.500	99,91	14.900
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>72.314.100</b>	<b>65.555.820</b>	<b>90,65</b>	<b>6.758.280</b>
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.157.500	49.346.220	77,80	5.811.280
a.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.600.000	11.341.400	90,01	1.258.600
b.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar nasional Perpustakaan	9.577.500	8.042.300	83,97	1.535.200
c.	Pengembangan bahan Pustaka	32.980.000	29.962.520	94,48	3.017.480
2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.156.600	16.209.600	94,51	947.000
a.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	12.460.900	11.950.000	95,89	510.900
b.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	4.695.700	4.259.600	90,71	436.100
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>42.287.000</b>	<b>40.881.550</b>	<b>96,68</b>	<b>1.405.450</b>
1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	28.602.000	27.976.550	97,81	625.450
a.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	18.602.000	18.184.150	97,75	417.850
b.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.792.400	97,92	207.600
2.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	13.685.000	12.905.000	99,99	780.000
a.	Akuisisi, Pengeolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	13.685.000	12.905.000	99,99	780.000
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.893.700</b>	<b>99,29</b>	<b>106.300</b>
1.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi D bawah 10 (sepuluh) Tahun	15.000.000	14.893.700	99,29	106.300
a.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	15.000.000	14.893.700	99,29	106.300
<b>Total</b>		<b>4.501.765.361</b>	<b>4.123.044.438</b>	<b>91,59</b>	<b>378.720.923</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Mojokerto Juncto Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 94 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis DISPERKA Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Urusan Kearsipan
  - a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban
  - b. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Urusan Perpustakaan
  - a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
  - b. Indeks Kegemaran Membaca

Kinerja pelayanan yang dicapai Disperka Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperka Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 2.2**  
 (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-06/08)	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						CATATAN
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>I. Indikator Kinerja Kunci (PP-06/08)</b>															
	<b>Urusan Kearsipan</b>															
1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban			50%	50%	52%	54%	56%	58%			104,123%				
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahanpertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara			50%	53%	53%	56%	59%	62%			129,9%				
	<b>Urusan Perpustakaan</b>															
3.	Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat			n/a	11	12	13	14	15	63,94	65,90	66,6				
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			40,5	41	41,5	41,5	42	42	12,158	13,24	77,12				

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang. Isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adalah:

1. Urusan Perpustakaan
  - a. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
  - b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
2. Urusan Kearsipan
  - a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban
  - b. Tingkat Keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
 (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,72	4.279.478.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,72	4.279.478.400	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	3.837.836.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	3.837.836.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.837.836.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.837.836.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90 %	111.705.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90 %	111.705.800	

5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	21.950000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	21.950.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	5.939.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	5.939.000	
8	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	24.816.800	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	24.816.800	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	9.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	9.000.000	
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>90 %</b>	189.525.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>90 %</b>	189.525.000	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	140.262.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	140.262.600	

			dan Listrik yang disediakan					dan Listrik yang disediakan			
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	49.262.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	49.262.400	
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>90%</b>	85.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>90%</b>	85.700.000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	50.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	50.700.000	
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	15.000.000	
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana prasarana gedung kantor	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana prasarana gedung kantor	1 unit	20.000.000	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			
17	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	Kab. Mojokerto	IPLM( Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	77,15	<b>65.000.000</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	Kab. Mojokerto	IPLM( Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	77,15	<b>65.000.000</b>	
			TGM (Tingkat Kegemaran Membaca)	67				TGM (Tingkat Kegemaran Membaca)	67		
18	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten yang dikelola	2 Perpustakaan	20.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kabupaten yang dikelola	2 Perpustakaan	20.000.000	
19	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	10.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	10.000.000	
20	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah	10 eksemplar	10.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah	20 eksemplar	25.000.000	

	Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan			Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan			
21	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	15 kali	45.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	15 kali	45.000.000	
22	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi social di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	35.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi social di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	35.000.000	
23	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah locus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	75 Locus	10.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah locus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	75 Locus	10.000.000	
24	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan	100%	<b>47.500.000</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan	100%	<b>47.500.000</b>	

			akuntabilitas Kinerja					akuntabilitas Kinerja			
25	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	5 OPD	32.500.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	5 OPD	32.500.000	
26	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	800 berkas	20.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	800 berkas	20.000.000	
27	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil	1 Laporan	12.500.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	12.500.000	
28	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	15.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	15.000.000	
29	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	500 Arsip	15.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	500 Arsip	15.000.000	
30	<b>Program Perlindungan dan</b>	Kab. Mojokerto	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip	53%	<b>12.733.200</b>	<b>Program Perlindungan dan</b>	Kab. Mojokerto	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip	53%	<b>12.733.200</b>	

	<b>Penyelamatan Arsip</b>		sebagai bahan pertanggungawaban			<b>Penyelamatan Arsip</b>		sebagai bahan pertanggungawaban				
31	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 peraturan	12.733.200	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 peraturan	12.733.200		
32	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	1000 berkas	12.733.200	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	1000 berkas	12.733.200		
<b>TOTAL</b>					<b>4.350.000.000</b>	<b>TOTAL</b>					<b>4.350.000.000</b>	

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas:

1. Penguatan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing, dengan indikator Pemenuhan layanan dasar pendidikan yang berkualitas
2. Penyederhanaan Birokrasi, dengan indikator Peningkatan Budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat sejak usia dini yang menguasai IPTEK dan talenta-talenta global.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan.

**Tabel 2.4**  
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2025**  
**Kabupaten Mojokerto**

### Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto didasarkan pada pencapaian prioritas nasional, Renstra Perpustakaan Nasional, Renstra Arsip Nasional, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur, RPJMD/RPJPD, Renstra Disperka Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto didasarkan pada kebijakan nasional terangkum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disperka Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Kebijakan Bidang Perpustakaan**

- a. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- c. Pengembangan perpustakaan menjadi pusat belajar, berkegiatan, berketerampilan, berkreasi dan berekreasi;
- d. Pembinaan semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka sinergi kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan termasuk pelestarian koleksi lokal Kabupaten Mojokerto;

##### **2. Kebijakan Bidang Kearsipan**

- a. Membangun sistem kearsipan yang komprehensif pada semua instansi guna menciptakan akuntabilitas tata kelola kearsipan;
- b. Menyusun pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi tata kelola kearsipan;

- c. Pengembangan sistem kearsipan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuju sistem kearsipan digital;
- d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata kelola kearsipan;
- e. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna dari semua instansi;
- f. Meningkatkan pelayanan, sosialisasi dan pembinaan kearsipan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan**

Tujuan dan Sasaran Renja PD disusun berdasarkan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketaqwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah **misi ketiga.**

Selanjutnya pada tabel dibawah ini digambarkan secara jelas tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renja**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target	
				2024	2025
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,31%	88,35%
2.		Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	88,31%	88,35%
3.		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,72	82,80
4.		Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi dan berkelanjutan	1	1

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan Tahun 2025 telah disusun dan dibahas dalam forum

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto yaitu 4 Program dan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 5.137.500.000,- (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh juta Lima Ratus Rupiah)** dari APBD Kabupaten dan DAK NF (Dana Alokasi Khusus Non Fisik -BOP Museum dan Taman Budaya -Museum, dengan rincian sebagai berikut:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Bahan/Material
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

#### **II. Program Pembinaan Perpustakaan**

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :
  - a. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

- b. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
  - c. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
- a. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
  - d. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

### **III. Program Pengelolaan Arsip**

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
  - b. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
  - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

### **IV. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
  - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**RANCANGAN AKHIR RENJA**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	BL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RUMUSAN TAHUN 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif	
									APBD	APBD Prov				APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2.23.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	Disperka	82,72	4.224.766.800	APBD	-	-	83,42	4.255.561.000	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Disperka	91,60%	3.837.836.000	APBD	-	-	91,65%	3.837.836.000	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disperka	30 Orang/bulan	3.837.836.000	APBD	-	-	30 Orang/bulan	3.837.836.000	
		Rincian :												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.837.836.000						
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Disperka	90%	111.705.000	APBD	-	-	90%	137.500.000	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Disperka	1 paket	50.000.000	APBD	-	-	1 paket	60.000.000	
		Rincian :												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000						
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Disperka	1 paket	21.950.000	APBD	-	-	1 paket	25.000.000	
		Rincian :												
		Penyediaan makanan dan minuman						21.950.000						
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Disperka	1 paket	5.939.000	APBD	-	-	1 paket	7.500.000	
		Rincian :												
		Biaya Foto copy dan penggandaan						5.939.000						
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material			Jumlah paket Bahan material yang disediakan	Disperka	1 paket	24.816.800	APBD	-	-	1 paket	30.000.000	
		Rincian :												
		Penyediaan alat tulis kantor						24.816.800						
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat	Disperka	25 laporan	9.000.000	APBD	-	-	25 laporan	15.000.000	

				Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Rincian :											
		Perjalanan Dinas ASN/Rapat Konsultasi dan Koordinasi					9.000.000						
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Disperka	86%	189.525.000	APBD	-	-		86%	189.525.000
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Disperka	12 laporan	140.262.600	APBD	-	-		12 laporan	140.262.600
		Rincian :											
		Pembayaran rekening listrik & telepon					140.262.600						
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Disperka	12 laporan	49.262.400	APBD	-	-		12 laporan	49.262.400
		Rincian :											
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (THL)					49.262.400						
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Disperka	90%	85.700.000	APBD	-	-		90%	90.700.000
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Disperka	10 unit	50.700.000	APBD	-	-		10 unit	50.700.000
		Rincian :											
		Biaya STNK, BBM, Suku Cadang											
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disperka	3 unit	15.000.000	APBD	-	-		3 unit	20.000.000
		Rincian :											
		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya					15.000.000						
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disperka	1 unit	20.000.000	APBD	-	-		1 unit	20.000.000
		Rincian :											

		Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya					20.000.000							
<b>2</b>	<b>2.23.02</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>			<b>1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>	Disperka	<b>72,25</b>	<b>852.500.000</b>	<b>APBD</b>	-	-			110.000.000
					<b>2. Indeks Kegemaran Membaca</b>		<b>67,1</b>							
	2.23.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Disperka	2 Perpustakaan	315.000.000	APBD	-	-			40.000.000
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan			Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan	Disperka	50 Perpustakaan	10.000.000	APBD	-	-		50 Perpustakaan	20.000.000
		Rincian :												
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Dasar (SDMI. SMP/MTs)												
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Disperka	1 Dokumen	112.500.000		-	DAK NF			
		Rincian :												
		Pendataan Perpustakaan												
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Disperka	10 Eksemplar	190.000.000	APBD	-	DAK NF		10 Eksemplar	20.000.000
		Rincian :												
		- Dokumentasi kekhasan Koleksi (Foto dipigora)												
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Disperka	1 Perpustakaan	2.500.000	-	-	DAK NF			
		Rincian :												
		- Pemeliharaan Komputer												
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Disperka	17 kali	537.500.000	APBD	-	-		17 kali	55.000.000
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Disperka	1 Perpustakaan	35.000.000	APBD	-	-	DAK NF	1 Perpustakaan	50.000.000
		Rincian :												

		- Pengembangan Bahan Pustaka												
		- Workshop Pustaka Terapan												
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Disperka	1 Perpustakaan	35.000.000	APBD	-	-	DAK NF	1 Perpustakaan	50.000.000
		Rincian :												
		Biaya Pemeliharaan Mobil Perpustakaan keliling												
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Disperka	.... Orang	245.000.000	APBD	-	-	DAK NF	1 Perpustakaan	50.000.000
		Rincian :												
		Lomba Perpustakaan, Festival Literasi												
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan Pendidikan	Disperka	75 Locus	222.500.000	APBD	-	-	DAK NF	75 Lokasi	20.000.000
		Rincian :												
		Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)/Mendukung KLA, TMMD Bimtek Membaca Nyaring Lomba bertutur												
<b>3</b>	<b>2.24.02</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>			<b>Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja</b>	Disperka	<b>100%</b>	<b>47.500.000</b>	<b>APBD</b>	-	-		<b>100%</b>	60.000.000
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	Disperka	56 PD	32.500.000	APBD	-	-		56 PD	40.000.000
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan penyusutan	Disperka	2000 berkas	20.000.000	APBD	-	-		2000 Berkas	25.000.000
		Rincian :												
		Biaya penyusutan arsip In aktif Perangkat Daerah						20.000.000						
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis	Disperka	1 laporan	12.500.000	APBD	-	-		1 laporan	15.000.000

				Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Rincian :											
		Monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan (56 OPD)					12.500.000						
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	Disperka	5 OPD	15.000.000	APBD	-	-		5 OPD	20.000.000
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Disperka	500 Arsip	15.000.000	APBD				500 Arsip	20.000.000
		Rincian :											
		-Biaya Pemeliharaan, Perawatan dan Penggunaan Arsip Statis - Restorasi Arsip untuk Letter C					15.000.000						
<b>4</b>	<b>2.24.03</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>		<b>Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</b>	Disperka	<b>100%</b>	<b>12.733.200</b>	<b>APBD</b>	-	-		<b>100%</b>	20.000.000
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	Disperka	3 peraturan	12.733.200	APBD	-	-		3 peraturan	20.000.000
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Disperka	1000 Arsip	12.733.200	APBD	-	-		1000 Arsip	20.000.000
		Rincian :											
		Penilaian (Narasumber, Honor Tim, dll)											
<b>JUMLAH TOTAL 5.137.500.000</b>							<b>5.137.500.000</b>						<b>4.445.561.000</b>

## **BAB IV**

### **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dengan rencana program kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	BL	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan dana	APBD	APBD Provinsi		USULAN APBN			Keterangan
					Output	Outcome					PD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK	
1	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,72	Disperka	4.224.766.800	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,60%	Disperka	3.837.836.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan	Disperka	3.837.836.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.837.836.000							
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	Disperka	111.705.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 paket	Disperka	50.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							50.000.000							
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1 paket	Disperka	21.950.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan makanan dan minuman							21.950.000							
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 paket	Disperka	5.939.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Biaya Foto copy dan penggandaan							5.939.000							
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Material			Jumlah paket Bahan material yang disediakan		1 paket	Disperka	24.816.800	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														

		Penyediaan alat tulis kantor						24.816.800								
2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 laporan	Disperka	9.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Perjalanan Dinas ASN/Rapat Konsultasi dan Koordinasi							9.000.000							
2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	86%	Disperka	189.525.000	APBD	-	-	-	-	-	
2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan	Disperka	140.262.600	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Pembayaran rekening listrik & telepon							140.262.600							
2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	Disperka	49.262.400	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (THL)							49.262.400							
2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	Disperka	85.700.000	APBD	-	-	-	-	-	
2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan			Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya		10 unit	Disperka	50.700.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Biaya STNK, BBM, Suku Cadang														
2.23.01.2.09.0010		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3 unit	Disperka	15.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya							15.000.000							

	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :													
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya						20.000.000							
2	2.23.02	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>				<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)</b>	72,25	Disperka	<b>852.500.000</b>	<b>APBD</b>	-	-	-	-	
						<b>Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)</b>	67,1								
	2.23.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	2 Perpustakaan	Disperka	315.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan			Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	Disperka	10.000.000	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :													
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Dasar (SDMI. SMP/MTs)													
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1 Dokumen	Disperka	112.500.000	-	-	DAK NF	-	-	-	
		Rincian :													
		Pendataan Perpustakaan													
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Eksemplar	Disperka	190.000.000	APBD	-	DAK NF	-	-	-	
		Rincian :													
		- Dokumentasi kekhasan Koleksi (Foto dipigora)													
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	Disperka	190.000.000	APBD	-	DAK NF	-	-	-	

		Rincian :														
		- Pemeliharaan Komputer														
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	17 kali	Disperka	537.500.000	APBD	-	-	-	-	-		
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	Disperka	35.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
		Rincian :														
		Pengembangan Bahan Pustaka Workshop Pustaka Terapan														
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Disperka	35.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
		Rincian :														
		Biaya Pemeliharaan Mobil Perpustakaan keliling														
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca Tingkat Kabupaten/Kota	.... Orang	Disperka	245.000.000		-	DAK NF	-	-	-		
		Rincian :														
		Lomba Perpustakaan, Festival Literasi														
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar Masyarakat			Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat	75 Locus	Disperka	222.500.000	APBD	-	DAK NF	-	-	-		
		Rincian :														
		Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)/Mendukung KLA, TMMD Bimtek Membaca Nyaring Lomba bertutur														
3	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan	100%	Disperka	47.500.000	APBD	-	-	-	-	-		

						<b>Akuntabilitas Kinerja</b>											
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	56 PD	Disperka	32.500.000	APBD	-	-	-	-	-		
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan penyusutan		800 berkas	Disperka	20.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
		Rincian :															
		Biaya penyusutan arsip In aktif Perangkat Daerah							20.000.000								
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		1 laporan	Disperka	12.500.000	APBD	-	-	-	-	-		
		Rincian :															
		Monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan (56 OPD)							12.500.000								
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	Disperka	15.000.000	APBD	-	-	-	-	-		
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses Arsip Statis			Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, Preservasi dan Akses Arsip Statis		500 Arsip	Disperka	15.000.000	APBD							
		Rincian :															
		Biaya Pemeliharaan, Perawatan dan Penggunaan Arsip Statis							15.000.000								
<b>4</b>	<b>2.24.03</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>				<b>Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</b>	<b>100%</b>	Disperka	<b>12.733.200</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun				Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	3 peraturan	Disperka	12.733.200	APBD	-	-	-	-	-		

	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun			Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun		1000 Arsip	Disperka	12.733.200	APBD	-	-	-	-	-	
		Rincian :														
		Penilaian (Narasumber, Honor Tim, dll)														
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>5.137.500.000</b>							

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan Renja serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Disperka Kabupaten Mojokerto, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di tingkat Kabupaten.

#### **4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari P-APBD dengan harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi,

RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, P-RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026, dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

#### 4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan antar bidang dan perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan harapan Renja Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 disusun dan semoga dapat bermanfaat serta berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 yang akan dicapai.

Mojokerto, Agustus 2024  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO



NOERHONO, S Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721008 199201 1 0x1